

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Transmigrasi merupakan pemindahan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah secara terorganisir, untuk memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah lain yang berpenduduk jarang. Berdasarkan undang-undang No.3 tahun 1972, transmigrasi memiliki makna adanya keharusan untuk menetap.¹ Transmigrasi telah dilaksanakan sejak zaman kolonial,² pada saat itu program ini dikenal dengan istilah “kolonisasi” untuk memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, sebagai tenaga kerja di sektor perkebunan. Para kolonis dipekerjakan dalam perkebunan milik pemerintah dan orang Belanda, mereka dipindahkan ke tempat yang baru bukan demi peningkatan kesejahteraannya, melainkan untuk kepentingan pemerintah dan orang Belanda. Setelah Indonesia merdeka program ini dikenal dengan istilah “Transmigrasi” dengan pelaksanaannya ditinjau kembali, tata cara pelaksanaannya disesuaikan serta tujuannya diubah menjadi demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.³

Transmigrasi ada dua bentuk, yang pertama transmigrasi umum dan yang kedua transmigrasi swakarsa. Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang dilaksanakan dan sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Sementara transmigrasi

¹Mirwanto Manuwiyoto. *Mengenal dan Memahami Transmigrasi*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 39.

²Rukman Sardjadidjaja. *Transmigrasi: Pembaharuan dan Integrasi Nasional*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 21..

³Muhajir Utomo dan Rofiq Ahmad, *90 Tahun Kolonisasi, 45 Tahun Transmigrasi: Redistribusi Penduduk di Indonesia*. (Jakarta: Puspa Swara, 1997), hlm. 7.

swakarsa dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu transmigrasi swakarsa/sepontannya DBB (Dengan Bantuan Biaya), transmigrasi swakarsa/spontan TBB (Tanpa Bantuan Biaya), transmigrasi swakarsa/spontan Banpres (Bantuan Presiden), dan transmigrasi spontan murni.⁴ Pada awal pelita IV tahun 1986, orientasi pelaksanaan transmigrasi diarahkan pada pengembangan pola-pola usaha seperti HTI, PIR Perkebunan, industri, perikanan, peternakan dan sebagainya.⁵ Secara khusus transmigrasi diarahkan kepada pengembangan agribisnis, dan agroindustri. Kebijakan tersebut tampak dari tindakan pemerintah mengundang para investor untuk menanam modal di daerah tujuan transmigrasi, melalui investasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya berskala besar.⁶

Berdasarkan INPRES No.1 tahun 1986 program transmigrasi dikaitkan dengan pengembangan pola perkebunan yaitu PIR-Trans (Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi). Sebagai penyelenggara dan penanggung jawab program ini sepenuhnya oleh pihak perusahaan, dalam program ini biaya pemukiman berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) serta untuk kebunnya disubsidi lewat KLBI (Kredit Likuidasi Bank Indonesia). Upaya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi transmigran, sudah selayaknya transmigrasi mengupayakan jenis tanaman perkebunan dibandingkan dengan mengupayakan

⁴Rukmadi Warsito dkk. *Transmigrasi: Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Permukiman*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hlm. 2-3.

⁵Tarsi Djojoprpto. *Perkembangan Penyelenggaraan Transmigrasi*. Dalam Muhajir Utomo dan Rofiq Ahmad, *90 tahun Kolonisasi: 45 tahun transmigrasi*, hlm 63.

⁶Siswono Yudohusodo. *Transmigrasi: Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen Dengan Persebaran yang Timpang*. (Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Grafika, 1998), hlm. 89-90.

jenis tanaman pangan.⁷ Pada masa Orde Baru, upaya pengembangan program PIR dalam rangka pemerataan pembangunan terutama pada akhir pelita IV, Provinsi Jambi turut mempersiapkan lahan untuk program tersebut. Tahun 1989 Pemda Jambi telah mempersiapkan lahan seluas 245.000 ha untuk penempatan transmigran, serta 431.000 ha untuk perkebunan PIR seperti perkebunan karet, kelapa sawit, dan cokelat.⁸ Perluasan area perkebunan seperti kelapa sawit bertambah 2,5%,⁹ perluasan ini dilakukan dengan cara membuka perkebunan-perkebunan baru, salah satunya dilakukan di Kecamatan Merlung.

Merlung merupakan sebuah Kecamatan yang berada dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.¹⁰ Tahun 1990 merupakan tahun awal penempatan program PIR-Trans,¹¹ dan sekaligus awal masuknya perusahaan kelapa sawit dalam skala besar untuk menanamkan modalnya. PIR-Trans ini merupakan sistem kemitraan inti-plasma, dimana petani plasma merupakan petani yang berasal dari transmigran (Pulau Jawa) dan masyarakat desa sekitar, sementara pihak inti merupakan perusahaan perkebunan swasta yaitu PT.IIS (Inti Indosawit Subur) yang merupakan anak dari perusahaan perkebunan ASIAN AGRI.

⁷Lihat Heeren, *Transmigrasi di Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia, 1979), hlm. 98.

⁸*Merdeka*, 17 Juli 1989: 3.

⁹Perluasan area perkebunan di Jambi mulai tampak setelah adanya tindakan Pemda terhadap banyaknya lahan perkebunan yang tidak dimanfaatkan, lihat *Kompas*, 17 Januari 1989:9. Sementara pengembangan perkebunan kelapa sawit di Jambi berdasarkan kebijakan untuk meningkatkan komoditi ekspor, dari satu komoditi yaitu karet kemudian dikembangkan komoditi kelapa sawit, dan cokelat. *Suara Pembaharuan*, 27 Januari 1989:3.

¹⁰Badan Pusat Statistik, *Tanjung Jabung Barat dalam angka 2016*. (Kuala Tungkal: Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2016), hlm. 1.

¹¹Monografi, *Proyek Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung, 1990*.

Transmigran dalam program PIR-Trans di Kecamatan Merlung ini ditempatkan pada 9 UPT (Uni Permukiman Transmigrasi) atau SP (Satuan Penduduk).¹² Adapun alasan para transmigran mengikuti program ini berbeda-beda, namun alasan utama pada umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, yang ingin lepas dari kemiskinan, tidak menjadi penganggur, dan hak-hak dasar mereka terpenuhi.¹³

Adanya proyek PIR kelapa sawit telah berhasil memberikan kesempatan kepada petani kecil untuk menjadi “tuan” di kebunnya sendiri. Akan tetapi permasalahan yang muncul semakin banyak dan kompleks, sehingga belum dapat diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah pusat dan daerah.¹⁴ Pada program PIR-Trans di Kecamatan Merlung, meskipun secara langsung dengan adanya tanaman kelapa sawit telah meningkatkan pendapatan masyarakat,¹⁵ namun berdasarkan hasil peneliti terdahulu, proyek PIR-Trans di Kecamatan Merlung ini juga terdapat beberapa masalah. Sebagai asumsi awal, permasalahan tersebut seperti adanya dampak terhadap lingkungan dan terjadinya masalah sengketa tanah.

Dampak terhadap lingkungan ini dapat dilihat dari pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pabrik pengolahan kelapa sawit perusahaan (22%),

¹²Monografi. *Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi Merlung, 1993.*

¹³Harry Heriawan Saleh, dkk. *Transmigrasi: Antara Kebutuhan Masyarakat dan Kepentingan Pemerintah.* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm.48.

¹⁴Simatupang, P. *Kemitraan Agribisnis Berdasarkan Paradigma Ekonomi Biaya Tinggi dalam Usaha Kecil Indonesia, Tantangan Krisis dan Globalisasi.* Center for Economic and Social Studies with the Asian Foundation, (Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Pertanian Indonesia, 1998), hlm. 122.

¹⁵Riska Angraini dkk. “Dampak Usaha Tani Kebun Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Merlung Kecamatan Merlung kabupaten Tanjung Jabung Barat”. *Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis*, Fakultas Pertanian Universitas Jambi, 2015. Vol 18. (2) 2015, ISSN 1412-8241, hlm. 23.

berkurangnya kuantitas air tanah (44%), dan berkurangnya populasi satwa (34%) dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.¹⁶ Permasalahan tanah dapat dilihat dari masalah antara perusahaan dengan masyarakat desa-desa sekitar dan perusahaan dengan transmigran. Masalah tanah dengan desa-desa sekitar seperti adanya tuntutan masyarakat dari 6 desa yang ada dalam Kecamatan Merlung kepada perusahaan kelapa sawit yaitu PT.IIS untuk mendapatkan ganti rugi yang layak terhadap tanah mereka.¹⁷

Masalah tanah dengan transmigran, dapat dilihat dari adanya tuntutan transmigran Desa Tanjung Benanak/SP3 terhadap PT.IIS atas tanah desa mereka seluas 38,8 ha yang telah diambil. Tuntutan transmigran ini telah dilakukan sejak tahun 1996 dan sampai sekarang belum ada kejelasannya.¹⁸ Berdasarkan beberapa uraian masalah tersebut, bahasan dalam kajian ini difokuskan kepada permasalahan tanah yang akan dilihat dari bagaimana penerapan program PIR-Trans itu sendiri di Kecamatan Merlung, terutama pada bentuk pelaksanaan, dan serta dampak yang ditimbulkan.

Daerah Merlung sebelum adanya program PIR-Trans terutama sebelum masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit, merupakan daerah pedalaman

¹⁶Rany Utami dkk. "Dampak Ekonomi Dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus: Desa Penyabungan, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi)." *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, Vol 22 (2) 115-126, ISSN 0853, EISSN 2443-3462, hlm 124.

¹⁷Lindayanti dan Zaiyardam Zubir. "Konflik dan Integrasi dalam Masyarakat Plural: Jambi 1970-2012". *Prosiding Seminar Nasional 70 Tahun Indonesia Merdeka*. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. 2015, hlm. 28-29.

¹⁸Wartanews.co. *PT. Inti Indosawit (IIS) Serobot Tanah Transmigrasi*, diakses pada 1 April, 2017. Oleh H/Jangeik. Dalam <http://wartanews.co/pt-inti-indosawit-subur-iis-serobot-tanah-transmigrasi/>. Diakses pada 10-10-2017, pukul 21:09 WIB.

dan dapat dikatakan masih terisolir. Akses jalan yang sering dilewati untuk menuju pusat kota melewati jalur sungai yaitu sungai Pengabuan, dengan menggunakan perahu. Jalur darat pada saat itu dalam kondisi jalan tanah, jarak tempuh bisa mencapai empat sampai lima hari, terutama jika hari hujan. Kehidupan masyarakat Merlung masih homogen dengan struktur Pemerintahan Marga,¹⁹ serta diatur oleh hukum adat terutama sebelum keluarnya undang-undang desa. Kehidupan ekonomi masyarakat Merlung cenderung menggantungkan dari hasil bertani terutama pada perkebunan karet, kopi, dan jenis tanaman lainnya.²⁰ Hubungan dan interaksi antar masyarakat berjalan damai, pergesekan sosial yang menimbulkan konflik hampir tidak terjadi.

Keadaan berbeda mulai terjadi setelah adanya program PIR-Trans tahun 1990, masyarakat Merlung sebagian besar bekerja sebagai petani kelapa sawit, serta sebagian kecil lainnya di perkebunan karet, PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pedagang. Pusat ekonomi daerah Merlung berada di Desa Merlung dengan nama Pasar Merlung. Pertumbuhan ekonomi Pasar Merlung sangat cepat, bahkan untuk saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam Kecamatan Merlung.

Perkebunan kelapa sawit membantu meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Merlung, baik transmigran maupun masyarakat asli Merlung. Selain memiliki nilai ekonomis, tanaman kelapa sawit juga mudah dalam

¹⁹Erdianto, "Perkembangan Kelembagaan dari Negeri dan Marga Menjadi Desa di Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjab Barat, Provinsi Jambi." *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Riau, 2011. Volume.2.No.2, hlm. 1.

²⁰Badan Pusat Statistik, *Tanjung Jabung dalam Angka 1988*. (Jambi: Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, 1988), hlm. 123-124.

pemeliharaannya dibandingkan dengan jenis tanaman lain yang ada dalam Kecamatan Merlung. Desa Merlung memiliki sentra produksi kelapa sawit cukup luas 1.917 ha, memiliki jumlah petani kelapa sawit cukup banyak 1.324 kk dibandingkan dengan Desa lain yang ada dalam Kecamatan Merlung.²¹ Sementara tingkat pendapatan ekonomi transmigran di Kecamatan Merlung bergantung pada perkebunan kelapa sawit, dalam sistem kemitraan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan yaitu dengan PT. IIS (Inti Indosawit subur).

Penerapan program PIR-Trans di Kecamatan Merlung pada tahun 1990, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terutama transmigran. Kebijakan pemerintah ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan non migas, hal ini terlihat dalam upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pelaksanaan PIR-Trans di Kecamatan Merlung tahun 1990 pada masa Orde Baru ini ternyata menyimpan masalah yaitu masalah sengketa tanah antara perusahaan kelapa sawit PT. Inti Indosawit Subur dengan masyarakat. Masalah tanah ini terjadi antara perusahaan dengan Desa-Desa yang ada dalam Kecamatan Merlung, terutama Desa Tanjung Paku, dan Desa Tanjung Benanak tanpa ada ganti rugi yang jelas. Atas dasar tersebut penulis ingin mendalami lebih lanjut penerapan program PIR-Trans di Merlung dengan judul **“Penerapan Program PIR-Trans Pada Masyarakat Perkebunan di Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi (1990-2015)”**.

²¹Riska Anggraini, dkk, “Dampak Usaha Tani Kebun Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Merlung Kecamatan Merlung kabupaten Tanjung Jabung Barat”. *Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis*, Fakultas Pertanian Universitas Jambi, 2015. Vol 18. (2) 2015, ISSN 1412-8241, hlm. 3.

B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Penelitian.

Permasalahan pokok yang ingin dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui program PIR-Trans di Kecamatan Merlung. Kehadiran perusahaan kelapa sawit dalam PIR-Trans diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup transmigran. Dalam perkembangannya kehadiran perusahaan ini juga menimbulkan berbagai permasalahan, terutama masalah tanah. Perusahaan yang merupakan kapitalis perkebunan kelapa sawit, dalam membangun perkebunan sering melebarkan sayap dengan cara mengarap tanah-tanah lain yang berada di sekitarnya. Kondisi ini seakan manusia haus akan lahan untuk mendapatkan keuntungan. Pencaplokan tanah-tanah desa sekitar yang ada dalam Kecamatan Merlung dilakukan dengan cara menyalah gunakan izin Hak Guna Usaha, hal ini terjadi pada awal pembangunan perkebunan kelapa sawit tahun 1990, selain itu petani plasma sebagai binaannya turut menjadi korban, dengan tidak jelasnya batas tanah Desa Tanjung Benanak dengan perkebunan inti milik PT.IIS. permasalahan ini sudah terjadi sejak tahun 1996.²²

Berdasarkan masalah diatas, maka diajukan beberapa pertanyaan pokok penelitian yaitu:

1. Bagaimana kondisi kehidupan transmigran pada awal dibukanya PIR-Trans di Kecamatan Merlung ?
2. Bagaimana penerapan program PIR-Trans di Kecamatan Merlung ?

²²Wartanews,co. *PT. Inti Indosawit (IIS) Serobot Tanah Transmigrasi*, diakses pada 1 April, 2017. Oleh H/Jangeik. Dalam <http://wartanews.co/pt-inti-indosawit-subur-iis-serobot-tanah-transmigrasi/>. Diakses pada 10-10-2017, pukul 21:09 Wib.

3. Mengapa terjadi masalah sengketa tanah pada program PIR-Trans di Kecamatan Merlung ?

Pembatasan penelitian dalam kajian ini difokuskan di Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Walaupun Kecamatan Merlung terjadi pemekaran wilayah administratif, namun lokasi penelitian tetap difokuskan pada daerah Merlung yang lama, sebagai daerah awal penempatan program PIR-Trans.²³

Periodesasi penelitian ini dilakukan dari tahun 1990 sampai tahun 2015. Tahun 1990 ditetapkan sebagai batasan awal kajian ini dikarenakan, awal masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit melalui program PIR-Trans di Merlung, sedangkan batasan akhir penelitian adalah tahun 2015. Tahun ini merupakan batasan akhir periode pertama dalam konsep kemitraan pola PIR-Trans di Merlung. Dimulai dari awal penempatan transmigran dan awal penanaman kelapa sawit, sampai masa peremajaan yang harus dilakukan replanting atau sesuai dengan 25 tahun masa produktif tanaman kelapa sawit (rata-rata replanting umur 20-25 tahun).²⁴ Periode pertama merupakan waktu yang kompleks dan menjadi penting bagi penulis untuk melihat bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit (PT.IIS) dan berbagai masalah yang muncul terutama permasalahan tanah, baik terhadap masyarakat desa-desa sekitar maupun terhadap transmigran sebagai binaannya.

²³Masalah pembatasan penelitian lebih lanjut lihat Zaiyardam Zubir, "Penguasa, Pengusaha, dan Petani: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Kesenjangan Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu Riau, 1978 – 2010." (Disertasi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2016), hlm. 7.

²⁴Iyung Pahan. "Paduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis Hulu Hingga Hilir". (Jakarta: Penebar Swadaya, 2010), hlm. 122.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan penelitian dapat diartikan sebagai pernyataan mengenai apa yang hendak di capai.²⁵ Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi kehidupan transmigran pada awal dibukanya PIR-Trans di Kecamatan Merlung ?
2. Menjelaskan bagaimana penerapan program PIR-Trans di Kecamatan Merlung.
3. Mengungkapkan masalah terjadinya sengketa tanah pada program PIR-Trans di Kecamatan Merlung.

Maanfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah literatur yang berhubungan dengan ilmu sejarah, sejarah sosial ekonomi khususnya. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan analisis maupun tambahan dalam rangka penelitian yang lebih mendalam di masa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka.

Pembahasan tentang program PIR-Trans di Kecamatan Merlung bukanlah hal yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan pengembangan modal besar perusahaan perkebunan kelapa sawit melalui program PIR-Trans. Bahasan yang berkaitan dengan PIR-Trans di Kecamatan Merlung telah ada dilakukan peneliti terdahulu. Setiap peneliti memiliki sudut pandang tersendiri dalam membahas permasalahan ini seperti :

²⁵Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: ar. Ruzz Media, 2011), hlm. 154.

Fatimah azzahra dkk, dalam penelitiannya yang berjudul: *Perempuan dan Resiliensi Nafkah Rumahtangga Petani Sawit: Analisis Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Jambi*.²⁶ Menjelaskan bahwa masyarakat dalam Kecamatan Merlung seperti Desa Penyabungan terjadi pergeseran dalam pendapatan yaitu dari perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit. Selain itu terjadi perubahan pekerjaan perempuan, dari rumah tangga menjadi buruh kelapa sawit. Perubahan ini merupakan dampak dari ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi dalam Kecamatan Merlung. Penelitian ini sangat membantu penulis dalam melihat berbagai dampak dari ekspansi perkebunan kelapa sawit terhadap masyarakat dalam Kecamatan Merlung. Sebagai pembeda, penulis ingin melihat lebih jauh lagi bagaimana penerapan PIR-Trans di Kecamatan Merlung dengan melihat berbagai dampak yang ditimbulkan terutama terjadinya sengketa tanah antara perusahaan dengan masyarakat dalam Kecamatan Merlung.

Rany Utamy dkk, dalam penelitiannya yang berjudul: *Dampak Ekonomi dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (studi kasus: Desa Penyabungan, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi)*.²⁷ Menjelaskan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit juga turut memberikan dampak lingkungan seperti yang terjadi dalam Kecamatan Merlung, Desa Penyabungan. Dampak terhadap lingkungan tersebut seperti berkurangnya

²⁶Fatimah Azzahra dkk. "Perempuan dan Resiliensi Nafkah Rumah Tangga Petani Sawit: Analisis Dampak Dari Perkebunan Kelapa Sawit di Jambi." *Jurnal Sosiologi pedesaan*, Program Studi Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor, 2017.

²⁷Rany Utami dkk. "Dampak Ekonomi Dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus: Desa Penyabungan, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi)." *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, Vol 22 (2) 115-126, ISSN 0853, EISSN 2443-3462.

kuantitas air tanah (kekeringan), berkurangnya populasi satwa, serta terjadi pencemaran sungai oleh limbah pabrik perusahaan pengolahan kelapa sawit. Penelitian ini juga membantu penulis dalam melihat berbagai dampak yang ditimbulkan, seperti dampak lingkungan yang terjadi setelah adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit dalam skala besar. Sebagai pembeda penulis juga ingin melihat lebih luas lagi berbagai dampak yang terjadi, seperti adanya masalah sengketa tanah antara perusahaan dengan masyarakat.

Zaiyardam Zubir dalam penelitiannya yang berjudul: *Konflik dan Integrasi Pada Masyarakat Plural Jambi 1970-2012*.²⁸ Menjelaskan bahwa, program PIR-Trans di Kecamatan Merlung juga terdapat masalah tanah, seperti tidak jelasnya bentuk ganti rugi tanah kelola Desa Tanjung Paku, Kecamatan Merlung oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Tidak hanya Desa Tanjung Paku, setidaknya ada 6 Desa dalam Kecamatan Merlung memiliki masalah tanah dengan perusahaan kelapa sawit. Penelitian ini tentunya relevan dan membantu penulis dalam memahami serta menguraikan terjadinya permasalahan tanah terutama tanah masyarakat dengan perusahaan. Sebagai pembeda, penulis ingin menguraikan lebih jelas lagi kronologi masalah sengketa tanah, tidak hanya perusahaan dengan masyarakat lokal, namun juga dengan transmigran sebagai binaan dari perusahaan kelapa sawit pada program PIR-Trans di Kecamatan Merlung.

²⁸Lindayanti dan Zaiyardam Zubir. "Konflik dan Integrasi dalam Masyarakat Plural: Jambi 1970-2012".*Prosiding Seminar Nasional 70 Tahun Indonesia Merdeka*. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. 2015, hlm. 21.

Farida Fitriyah dalam bukunya berjudul: *Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi*.²⁹ Menjelaskan mengenai pengadaan tanah untuk program transmigrasi, dilihat dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah, baik tanah negara maupun tanah adat. Dalam kajiannya pada transmigrasi di Bengkulu, terdapat permasalahan tanah yang terjadi tumpang tindih, bahkan dalam satu petak tanah bisa terdapat lebih dari lima sertifikat yang kepemilikannya berbeda-beda. Sumber ini tentunya sangat membantu dalam memahami permasalahan tanah di pemukiman transmigrasi, baik masalah tanah antara transmigran maupun masalah tanah transmigran dengan terhadap pihak lain. pembahasan ini tentunya membantu penulis dalam memahami permasalahan tanah pada pemukiman transmigrasi dan penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi terutama pada 9 UPT PIR-Trans di Merlung terhadap permasalahan tanah.

Saraswati Soegiharto dalam bukunya yang berjudul: *Transmigrasi: Belajar dari Kisah Sukses*.³⁰ Buku ini dengan jelas menggambarkan beberapa daerah di Indonesia yang terdapat program transmigrasi, transmigrannya menjadi sukses atau berhasil dari sebelum mereka mengikuti transmigrasi. Dalam buku ini juga menyinggung masalah PIR-Trans di Kecamatan Merlung. Dijelaskan bahwa program transmigrasi dalam Kecamatan Merlung turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, rata-rata menyumbang sebanyak 3 Desa dalam satu Kecamatan. Dampak ini dinilai sangat kecil, ditambah lagi dengan kurang baiknya hubungan ekonomi secara langsung antara transmigran dengan

²⁹Farida Fitriyah, *Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi*. (Malang: Setara Press, 2016).

³⁰Saraswati Soegiharto, *Transmigrasi: Belajar Dari Kisah Sukses*. (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2008).

masyarakat di luar UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi). Sebagai alat ukur keberhasilan transmigrasi dalam buku ini yaitu dengan melihat transmigrasi teladan, seperti melihat tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, partisipasi dan mental spiritual, serta peran istri dalam mendukung keberhasilan keluarga. Penelitian ini tentunya sangat membantu penulis dalam melihat berbagai dampak dari program transmigrasi, baik dampak negatif maupun dampak positif. Sebagai pembeda penulis mencoba melihat lebih dalam lagi berbagai perubahan yang terjadi terutama berhubungan dengan penduduk dan pembangunan setelah adanya PIR-Trans di Kecamatan Merlung.

Pembahasan yang berhubungan dengan program PIR-Trans dapat dilihat dalam buku yang ditulis oleh Siswono Yudohusodo yang berjudul: *Transmigrasi: Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heteraogen Dengan Persebaran Yang Timpang*.³¹ Buku ini menjelaskan tentang program transmigrasi yang dikaitkan dengan berbagai permasalahan kependudukan di Indonesia. Pembahasan ini juga menjelaskan transmigrasi pola PIR-Trans. Dijelaskan bahwa dalam pengembangan wawasan agribisnis yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, maka mensejahterakan petani merupakan langkah pertama yang harus dilakukan.

Upaya mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan maka dilakukan pembangunan pertanian modern yang berorientasi agribisnis/agroindustri, seperti petani harus menggunakan cara dan alat modern. Pada petani plasma kelapa sawit, hal ini masih dalam fase pembinaan yaitu dilakukan oleh perusahaan perkebunan

³¹Siswono Yudohusodo, *Transmigrasi: Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen Dengan Persebaran yang Timpang*. (Jakarta: PT.Jurnalindo AksaraGrafika, 1998).

seperti pola PIR-Trans. Selain itu pembahasan ini juga menjelaskan berbagai harapan transmigrasi kedepannya dan juga menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program transmigrasi dilapangan. Pembahasan ini tentunya membantu penulis dalam melihat berbagai bentuk pembinaan dari pihak pembina (pihak inti/perusahaan) maupun pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan transmigran, terutama penulis ingin melihat hal tersebut dalam transmigrasi pola PIR-Trans di Merlung.

Muhajir Utomo dan Rofiq Ahmad dalam bukunya yang berjudul: *90 Tahun Kolonisasi, 45 Tahun Transmigrasi: Redistribusi Penduduk di Indonesia*.³² Dalam buku ini juga membahas transmigrasi PIR-Trans, dijelaskan secara umum bahwa *Agro Estate* dan PIR-Trans (Mandiri) merupakan pola perkebunan rakyat yang dikelola secara agribisnis dengan transmigran sebagai pemilik kebun plasma. Selain itu juga dijelaskan mengenai anggaran pembiayaan, pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan, mekanisme pelaksanaan yang melibatkan beberapa pihak seperti: Perusahaan Perkebunan (Pihak Swasta atau *Developer*), Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan, Kepala Daerah Tingkat I, Departemen Koperasi, serta instansi terkait. Penjelasan tersebut tidak jauh berbeda dengan transmigrasi PIR yang ada di Merlung, dan pihak perusahaan perkebunan atau pihak inti dikelola oleh PT. IIS (Inti Indosawit Subur). Sementara petani plasma terdiri dari transmigran dari Pulau Jawa dan masyarakat Desa sekitar. Sumber ini juga membantu penulis dalam memahami berbagai langkah dalam penerapan transmigrasi PIR-Trans seperti di Merlung.

³²Muhajir Utomo, dan Rofiq Ahmad, *90 Tahun Kolonisasi, 45 Tahun Transmigrasi*. (Jakarta: Puspa Swara, 1997).

Sujarwadi dengan tulisannya yang berjudul: *Transmigrasi Swakarsa, Transmigrasi Nelayan, Transmigrasi Perkebunan, dan Transmigrasi Industri*.³³ Keterangan ini menjelaskan tentang program transmigrasi dalam beberapa pola seperti pola nelayan, perkebunan, industri bahkan pola tri-partial. Pembahasan ini juga menjelaskan beberapa masalah dalam transmigrasi seperti transmigrasi pola perkebunan yang terdapat di Jambi, yaitu di Pamenang dan Rimbo Bujang. Permasalahan tersebut seperti adanya masalah tanah, kelebihan hasil panen, transportasi, dan harga. Pembahasan ini ada kesamaan dengan penulis yaitu membahas transmigrasi pola perkebunan yang mengupayakan tanaman ekspor. Sebagai pembeda sumber ini membahas transmigrasi dengan tanaman perkebunan karet sementara penulis membahas transmigrasi dengan tanaman perkebunan kelapa sawit.

Yondri dengan judul penelitiannya: *Perkebunan Sawit dan Perubahan Sosial Masyarakat Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko*.³⁴ Pembahasan tersebut menjelaskan bahwa adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat setelah masuknya perkebunan kelapa sawit terutama dalam skala besar, pembahasan ini dilakukan di Bengkulu. Masuknya perkebunan kelapa sawit telah mengubah sistem mata pencaharian masyarakat dan diikuti dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti aspek hubungan sosial, diversifikasi mata pencaharian, pola kehidupan, dan pembagian kerja.

³³Sujarwadi dalam Rukmadi Warsito, dkk, *Transmigrasi: Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Permukiman*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1984).

³⁴Yondri dalam Indraddin, ed, *Perubahan Sosial Pada Masyarakat Transisi*. (Padang: Badan Pusat Nilai Budaya Padang, 2013).

Bahasan ini juga membantu penulis dalam memahami perubahan yang terjadi pada masyarakat terutama setelah adanya perkebunan kelapa sawit.

Pembahasan yang berhubungan dengan perkembangan industri kelapa sawit dan sistem kemitraan PIR-Trans dapat dilihat dalam buku Iyung Pahan dengan judul: *Paduan Lengkap Kelapa Sawit, Manajemen Agribisnis Hulu Hingga Hilir*.³⁵ Dalam buku ini dijelaskan tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit, perkembangan industri hilir dan hulu, serta menjelaskan kinerja perusahaan kelapa sawit dalam program PIR dengan sistem kemitraan inti-plasma. Sebagai sumber, buku ini tentunya sangat membantu penulis dalam melihat sistem kemitraan antara petani plasma dengan pihak inti. Selain itu memberikan keterangan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan petani kelapa sawit. Secara spesifik buku ini membahas tentang cara bertani kelapa sawit dengan baik, sampai dengan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit. Sebagai pembeda buku ini tidak terlalu dalam membahas adanya dampak yang ditimbulkan terutama dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Menurut Revrison Baswir dalam bukunya yang berjudul: *Dilema Kapitalisme Perkoncoan*. Menjelaskan bahwa dalam pola kemitraan kelapa sawit, petani plasma sering dirugikan. Sumber ini mengungkapkan bagaimana nasib petani plasma dalam sistem kemitraan inti plasma. Adanya perkoncoan atau kerjasama antara pihak perusahaan dengan penguasa (pihak lain) dalam mencari keuntungan, petani selalu dirugikan. Hal ini terlihat seperti dalam sistem kredit, KUD, dan harga TBS. Sumber ini tentunya membantu penulis dalam memahami

³⁵Iyung Pahan. *Paduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis Hulu Hingga Hilir*. (Jakarta: Penebar Swadaya, 2010).

kinerja perusahaan dalam PIR-Trans. Sebagai pembeda penulis ingin menguraikan lebih jelas lagi bagaimana kinerja perusahaan kelapa sawit dalam PIR-Trans terutama di Merlung, dalam membina transmigran. Hal ini tentunya berhubungan dengan konsep kemitraan yang saling menguntungkan dan membutuhkan sehingga tercapai tujuan transmigrasi PIR-Trans yang diharapkan.

Adanya kajian dari penelitian terdahulu tersebut, diharapkan dapat membantu penulis untuk mengembangkan penelitian tesis ini lebih lanjut. Berdasarkan informasi dari hasil peneliti terdahulu tersebut, ada perbedaan kajian mendalam yang mungkin belum pernah dibahas. Dalam penelitian tesis ini, penulis mencoba menguraikan bagaimana penerapan program PIR-Trans di Merlung, yang dikaitkan dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit, serta dampak yang terjadi, baik yang positif maupun yang negatif, berdasarkan waktu, tempat dan sudut pandang yang berbeda.

E. Kerangka Teori.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun ironisnya sampai sekarang negara Indonesia dapat dikategorikan negara yang kurang maju atau dapat dikatakan terbelakang yang disebabkan kurang seimbangnya persebaran penduduk. Hal tersebut dianggap penghambat pembangunan nasional sehingga pemerintah mengambil kebijakan dengan meningkatkan program transmigrasi yang dianggap mampu dalam mengembangkan pembangunan daerah.³⁶

³⁶Rukmadi Warsito. *Transmigrasi: Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Permukiman*. (Jakarta: CV.Rajawali, 1984), hlm. 187.

Program transmigrasi merupakan langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah kepadatan penduduk, tidak hanya Indonesia, sedikitnya ada 27 negara yang menyelenggarakannya dengan nama yang berbeda, ada yang sudah selesai, masih berjalan dan baru dimulai.³⁷ Program transmigrasi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1905 oleh pemerintah Kolonial Belanda dengan sebutan koloni, dengan tujuan memindahkan penduduk Pulau Jawa yang berlebihan ke luar Pulau Jawa, kemudian program tersebut dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia dengan nama transmigrasi.³⁸ Menurut Mulyadi, transmigrasi adalah suatu sistem pembangunan terpadu dari seperangkat prinsip dan metode untuk penyelenggaraan permukiman dan kehidupan baru bagi suatu kelompok masyarakat.³⁹

Menurut UUD No.31972, transmigrasi adalah perpindahan atau perpindahan penduduk dengan sukarela dari suatu daerah ke daerah lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau alasan-alasan yang di pandang perlu oleh masyarakat.⁴⁰ Sementara transmigrasi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya permasalahan ekonomi, kekurangan tanah garapan, bencana alam, kerusuhan, pengangguran.⁴¹ Ketentuan untuk daerah asal transmigrasi diatur

³⁷Siswono Yudohusodo. *Transmigrasi: Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang*. (Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Grafika, 1998), hlm. 74-75.

³⁸MacAndrew Colin, dan Rahardjo. *Permukiman di Asia Tenggara dan Transmigrasi di Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1979), hlm. 88.

³⁹Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 161.

⁴⁰Ahmadi, dan Kaelany. *Kependudukan di Indonesia dan Berbagai Aspeknya*. (Semarang: Mutiara PermataWidiya, 1973). Hlm.149.

⁴¹Heeren. *Transmigrasi di Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia, 1979), hlm. 39-42.

dalam Keppres No.1/1973, menetapkan Pulau Jawa, Madura dan Bali, serta Lombok sebagai asal daerah transmigrasi, sementara daerah tujuan transmigrasi dapat dilihat dalam keppres No.2/1973 menetapkan bahwa Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat sebagai daerah tujuan transmigrasi.⁴²

Lebih lanjut Ahmadi dan Kaelani menyebutkan bahwa tujuan transmigrasi salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan taraf hidup bangsa Indonesia. Adanya transmigrasi, tanah-tanah yang kosong dan luas berupa hutan di Pulau-Pulau lainya dapat di manfaatkan. Selain itu juga memberikan kesempatan kerja bagi para petani yang tidak memiliki tanah garapan. Sebagaimana di ketahui banyak petani di Pulau Jawa hanya memiliki 0,3 ha tanah, padahal untuk hidup dengan layak minimal seorang petani harus memiliki 2 ha tanah. Tersedianya ribuan hektar tanah di luar Pulau Jawa dan Madura, maka perlu pemindahan para petani untuk memanfaatkan tanah-tanah kosong tersebut. Penggarapan tanah-tanah kosong yang ada di Pulau Sumatra utamanya di daerah Merlung diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Secara garis besar transmigrasi sebagai program serbaguna (*Multi Purpose Program*), diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigrasi dan masyarakat sekitar, mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, dan memperkokoh persatuan dan persatuan bangsa dengan harapan dapat memecahkan permasalahan demografi, sosial, ekonomi,

⁴²Ahmadi, dan Kaelany. *Kependudukan di Indonesia dan Berbagai Aspeknya*. (Semarang: Mutiara PermataWidiya, 1973), hlm.249.

serta politik.⁴³ Dalam pasal 4 PP No. 42 tahun 1973, transmigrasi dibedakan berupa Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarsa/Spontan. Transmigrasi Umum merupakan transmigrasi yang biaya pelaksanaan sepenuhnya dari pemerintah dan Transmigrasi Swakarsa/Spontan merupakan transmigrasi yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh transmigran yang bersangkutan atau pihak lain. Berdasarkan tipe-tipe transmigrasi dalam pembangunan daerah yang dilihat dari segi pengembangan ekonomi, dapat dibedakan dalam transmigrasi pola pertanian pangan, perkebunan, nelayan, serta industri.⁴⁴

Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian No.688 dikembangkan pola PIR-BUN (Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan) sebagai pengembangan perkebunan besar dalam perpaduan mewujudkan perbaikan keadilan sosial ekonomi. Adanya kebijakan tersebut dalam perkembangannya, maka dikeluarkan INPRES No.1 tahun 1986, tentang pengembangan perkebunan pola PIR yang dikaitkan dengan program transmigrasi yaitu PIR-Trans (Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi). Program ini merupakan kelanjutan pengembangan perkebunan dengan konsep dasar yang sama, namun tanggung jawab penyelenggara pembangunan hampir seluruhnya berada pada milik perusahaan inti atau perusahaan perkebunan.

Berdasarkan asal daerah, PIR-Trans pesertanya merupakan masyarakat dari luar lokasi proyek PIR melalui program transmigrasi dan masyarakat yang tanahnya terkena proyek PIR, baik transmigran maupun masyarakat lokal mereka

⁴³Saraswati Soegiharto. *Transmigrasi: Belajar Dari Kisah Sukses*. (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2008), hlm. 5-6.

⁴⁴Rukmadi Warsito. *Transmigrasi: Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Permukiman*. (Jakarta: CV.Rajawali, 1984), hlm. 1-3.

tergabung dalam petani plasma. Berdasarkan jenis kebun PIR-Trans terdiri dari kebun plasma dan kebun inti, kebun plasma merupakan kebun yang kepemilikannya oleh petani plasma setelah dikonversi dari pihak inti, sementara kebun inti merupakan kebun yang kepemilikannya oleh perusahaan perkebunan. Alokasi dana PIR-Trans berasal dari APBN. Pembiayaan pembangunan dilakukan untuk kebun plasma dan inti, rumah, lahan pangan dan pekarangan, serta jalan permukiman, dan fasilitas pengolahan merupakan komponen kredit, sedangkan pembiayaan pembinaan dan fasilitas sosial, pendidikan dan kesehatan yang merupakan komponen non kredit. Seluruh biaya pembangunan ini menjadi tanggung jawab pihak perusahaan inti, selanjutnya biaya ini diganti oleh Bank pemerintah. sampai akhir tahun 1997, telah dibangun 56 lokasi usaha transmigrasi pola PIR-Trans.⁴⁵ Pengembangan transmigrasi PIR-Trans telah dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk salah satunya di Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Penerapan program PIR-Trans di Merlung mulai dilaksanakan pada tahun 1990, faktor yang mendorong program ini diterapkan yaitu tersedianya lahan kosong atau belum digarap yang relatif subur dan terbukanya masyarakat Merlung dalam menerima kaum pendatang atau transmigran. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan PIR-Trans di Merlung sepenuhnya berada pada pihak perusahaan perkebunan yaitu PT.IIS (Inti Indosawit Subur) sebagai perusahaan kelapa sawit swasta. Tanaman kelapa sawit yang dikembangkan melalui program PIR-Trans ini tentunya sangat membantu meningkatkan pendapatan keluarga, baik transmigran

⁴⁵Siswono Yudohusodo. *Transmigrasi: Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang*. (Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Grafika, 1998), hlm. 90.

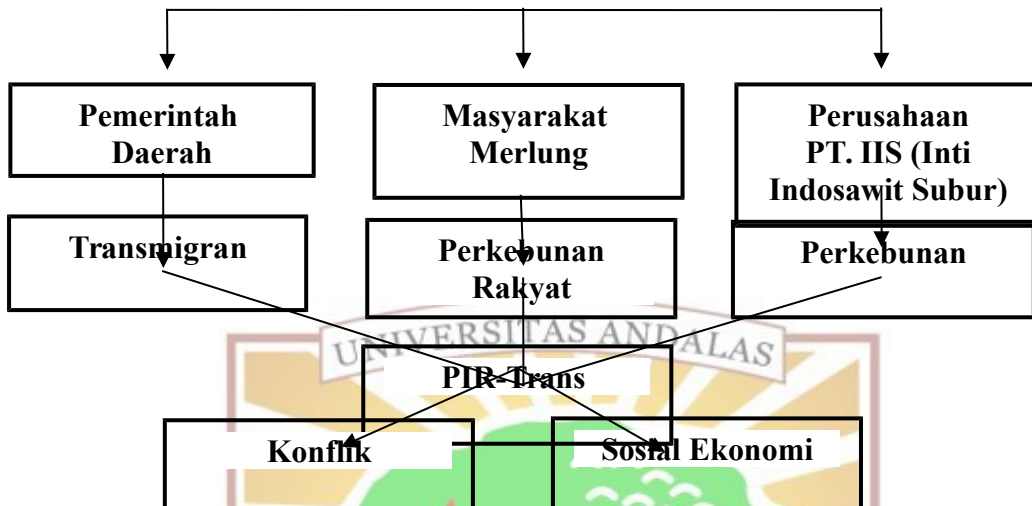
maupun terhadap masyarakat sekitar. Melalui program ini pula perusahaan melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit dalam skala besar, sehingga dalam mencari keuntungan tidak menghiraukan pihak lain yang dirugikan. Dampak yang merugikan terutama terhadap masyarakat desa-desa sekitar. dampak tersebut seperti dampak lingkungan dan terjadinya permasalahan sengketa tanah.

Penerapan program PIR-Trans tidak lepas dari adanya struktur-struktur yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Dalam kajian ini akan diuraikan beberapa teori, konsep atau pendekatan yang akan digunakan dalam menganalisis penerapan program PIR-Trans pada masyarakat perkebunan di Merlung, terutama yang berhubungan dengan sistem yang diterapkan. Strukturalisme pada umumnya memusatkan perhatian pada struktur atau sistem yang dibangun dari relasi sosial yang saling mempengaruhi, jadi struktur yang mendasari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Marx, sebagaimana menurut Levi Strauss, struktur bukanlah sebuah realitas yang terlihat dan diamati secara langsung, tetapi tingkat realitas yang ada diluar hubungan yang tampak antara manusia dan merupakan logika yang mendasari sistem dan melaluinya aturan yang tampak dapat dijelaskan. Menurut Godelier, apa yang tampak adalah realitas yang menyembunyikan realitas lain, realitas yang lebih dalam yang tersembunyi.⁴⁶

Untuk memudahkan melakukan analisa pada penelitian ini, maka dibuat skema pemikiran untuk melakukan penelitian yang akan digambarkan pada gambar 1.1 berikut ini.

⁴⁶George Ritzer dan Douglas Goodman. *Teori Sosiologi Modern, edisi ke-6*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 607.

Gambar 1.1 Skema Pemikiran.



Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa, berdasarkan kebijakan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah diterapkan program PIR-Trans di Kecamatan Merlung. Dalam program ini adanya saling ketergantungan baik pemerintah, perusahaan maupun masyarakat. Ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan tersebut seperti pemerintah membutuhkan pajak, dan perusahaan membutuhkan tanah murah untuk perkebunan kelapa sawit, buruh, serta masyarakat membutuhkan ganti rugi tanah yang layak, perlindungan hukum, lowongan kerja, dan kesejahteraan. Sebagai dampak dari program ini, adanya tanaman kelapa sawit dapat meningkatkan pendapatan terutama transmigran, namun bagi masyarakat desa-desa sekitar mereka kehilangan tanah garapan atau ganti rugi yang tidak layak dan menyempitnya lapangan pekerjaan, meskipun mereka berkerja di perusahaan namun hanya sebagai buruh. Melalui pendekatan struktural perusahaan kelapa sawit dalam program PIR-Trans di Kecamatan Merlung menggunakan kekuasaan negara atau kebijakan yang dibuat oleh negara untuk

mendapatkan tanah rakyat, sehingga terjadi konflik. Program ini melibatkan hubungan segitiga eksploitatif yang cenderung merugikan rakyat.⁴⁷

F. Metode penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu sejarah dengan pendekatan sosial-ekonomi, melalui empat tahapan yaitu pengumpulan sumber (heuristik), pengujian (kritik), interpretasi dan penulisan (historiografi).⁴⁸

Pertama, sumber dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber tertulis dan sumber lisan, baik yang bersifat primer maupun skunder. Teknik pengumpulan sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dengan mencari literatur seperti, arsip, laporan penelitian, buku-buku, maupun jurnal yang berhubungan dengan PIR-Trans di Kecamatan Merlung.

Sumber seperti arsip penulis peroleh dari Badan Kearsipan Provinsi Jambi, dalam bentuk monografi lokasi UPT (Unit Permukiman Transmigrasi) Merlung, dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, berupa laporan penempatan transmigrasi di Kecamatan Merlung, serta arsip kantor Desa seperti Desa Merlung, Desa Cinta Damai, Desa Lampisi, Desa Tanjung Benanak, Desa Bukit Harapan Sumber tertulis seperti buku diperoleh dari Perpustakaan Wilayah Propinsi Jambi, Perpustakaan Universitas Batanghari, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas. Sumber tertulis lainnya berupa data statistik Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

⁴⁷Lebih jelas lihat Zaiyardam Zubir, "Penguasa, Pengusaha, dan Petani: Kapitalis Perkebunan Kelapa Sawit, Kesenjangan Ekonomi dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu Riau 1978-2010." *Disertasi*. Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016, hlm, 302.

⁴⁸Louis Gottschal. *Mengerti Sejarah*. (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 33-34.

Kecamatan Merlung yang didapat dari kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

Tahap berikutnya dalam penelitian ini berupa pengumpulan sumber lisan yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan pola tidak terstruktur dari menemui informan satu, bergulir ke informan lain yang menjadi tokoh kunci dan dapat dipercaya dalam memberikan informasi maupun keterangan terkait penelitian ini. Wawancara awal dilakukan dengan menemui salah seorang tokoh yang bernama Syafi'i Ahmad, pernah menjabat sebagai Kepala Desa/Demong di Desa Merlung dari tahun 1980-2002 (informasi ini tentunya membantu dalam menjelaskan masuknya PIR-Trans di Kecamatan Merlung tahun 1990) dan sebagai Ketua Adat Desa Merlung. Wawancara berikutnya dilakukan di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang bernama Nana dan Panca yang pernah melakukan pembinaan transmigran di UPT Merlung dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Sedangkan informasi penting di lingkungan UPT Merlung didapatkan dengan mewawancarai beberapa transmigran seperti yang bernama Salju di UPT Merlung I/SP2, Desa Lampisi merupakan transmigran pertama dari Jawa Tengah, sedangkan bernama Johan di UPT ini berasal dari Desa Merlung/lokal, bergulir ke UPT lain yaitu UPT Merlung II/SP3, Desa Tanjung Benanak, wawancara dilakukan dengan Subardi yang merupakan transmigran pertama di UPT ini. Wawancara berikutnya di UPT Merlung III/SP 4, Desa Bukit Harapan dengan transmigran bernama Gamal, dan Ateng. Wawancara berikutnya terhadap beberapa masyarakat dalam Kecamatan Merlung, untuk mencari informasi bagaimana gambaran kehidupan masyarakat

sebelum dan sesudah adanya PIR-Trans terutama berkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Merlung seperti yang bernama, Wani, Aman, Iyan, Alik, Min, Asnah, Megi, Jondri, dan Robin. Wawancara terakhir penulis lakukan untuk memperjelas permasalahan sengketa tanah antara perusahaan kelapa sawit yaitu PT.IIS (Inti Indosawit Subur) dengan masyarakat dalam program PIR-Trans di Kecamatan Merlung yaitu dengan Alek, Syafi'i Ahmad, Johan di Desa Merlung, sementara wawancara dengan transmigran yaitu dengan Subardi di Desa Tanjung Benanak, dan Gamal di Desa Bukit Harapan. Semua data atau sumber informasi lisan yang telah diperoleh melalui wawancara tersebut ada yang bersifat terbuka dan ada juga yang tertutup dengan pola tidak terstruktur yang terjadi di lapangan.

Kedua, kritik sumber merupakan tahap penyeleksian sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh. Kritik terhadap sumber meliputi kritik eksteren, dan kritik interen. Kritik eksteren dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan sumber (otentitas sumber) sedangkan kritik interen dilakukan untuk menguji tingkat kredibilitas sumber, apakah sumber itu bisa dipercaya atau tidak. Kritik interen dan eksteren yang ditemukan di lapangan berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa perbedaan yang mencolok misalnya kasus sengketa tanah antara perusahaan dengan masyarakat dalam program PIR-Trans di Kecamatan Merlung, pihak perusahaan kelapa sawit swasta PT.IIS pada saat diwawancara menjelaskan tidak ada permasalahan dan mereka telah mengurus izin sesuai ketentuan dengan penjelasan yang bersifat tertutup, sementara wawancara dengan masyarakat asli Merlung (bernama Alek) dan transmigran (bernama Subardi dan Gamal)

didapatkan informasi bahwa mereka telah dirugikan oleh PT.IIS atas hilangnya tanah mereka. Perbedaan lain dalam wawancara terhadap masyarakat seperti di Desa Merlung bernama Alek yang menjelaskan bahwa, tuntutan atas tanah mereka kepada perusahaan PT.IIS didasari dengan bukti tanah tersebut merupakan tanah perkebunan/tanah orang tua mereka (tuntutan ini dilakukan bersama-sama oleh 6 Desa yaitu Muara Papalik, Merlung, Lubuk Terap, Penyabungan, Pulau Pauh, dan Rantau Benar), sementara Desa Tanjung Paku tidak ikut dalam tuntutan tersebut dikarenakan tanah perkebunan/orang tua mereka tidak ada. Sumber lisan ini berbeda ketika mewawancarai seorang bernama Fa'i mantan Kepala Desa Tanjung Paku 2001 sampai 2014 di Desa Tanjung Paku. Didapatkan informasi bahwa memang tanah perkebunan/orang tua mereka tidak ada yang digusur oleh PT.IIS, namun tanah untuk penempatan UPT Merlung IV/SP6, Desa Adi Purwa dan UPT Merlung VIII/SP5, Desa Pinang Gading, bahkan perkebunan inti perusahaan PT.IIS di sekitar UPT tersebut merupakan tanah kelola Desa Tanjung Paku. Jangankan untuk diikut sertakan menjadi transmigran sebagai petani plasma, ganti rugi atas tanah kelola Desa mereka dari tahun 1990 sampai tahun 2015, bahkan sampai tahun 2017 tidak mereka dapatkan. Luasnya tanah kelola Desa Tanjung Paku dibuktikan dengan peta Desa yang dibuat pada tahun 2000, dan mengingat Desa Tanjung Paku merupakan Desa tertua dalam Kecamatan Merlung selain Desa Merlung, jadi sangat sinkron luasnya tanah kelola Desa Tanjung Paku. Berdasarkan informasi dari hasil wawancara, maka dengan bijak peneliti menggunakan sumber yang dapat dipercaya yaitu dengan memilih pihak

masyarakat baik transmigran di Desa Tanjung Benanak, maupun masyarakat di Desa Merlung dan Desa Tanjung Paku sebagai sampel penelitian.

Ketiga, interpretasi merupakan penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah diseleksi melalui upaya analisa dan sintesa, sehingga mendapat suatu gambaran sejarah yang logis, dan sistematis berdasarkan fakta sejarah. *Keempat*, historiografi merupakan tahap penulisan sejarah. Pada tahap akhir ini penulisan melakukan koreksi bertahap dan koreksi total untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang sifatnya *substansial*, sehingga menjadi sebuah rangkaian bermakna, analitis dan layak dijadikan penulisan sejarah.

G. Sistematika Penulisan.

Tulisan ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan satu sama lainnya, namun ada pembatasan yang dilakukan sehingga pembahasan tidak terlalu luas. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami tulisan ini maka akan diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, memberikan penjelasan secara garis besar tentang penulisan ini, terdiri dari Pendahuluan dengan sub bab Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Batasan Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, membahas kehidupan masyarakat pada awal penerapan program PIR-Trans di Merlung. Masyarakat yang dimaksud yaitu masyarakat Merlung dan transmigran. Masyarakat Merlung akan dibahas mulai dari struktur masyarakat sampai dengan pola kepemilikan tanah, sementara transmigran dibahas mulai dari

kondisi awal kedatangan sampai dengan interaksi terhadap masyarakat disekitar. Selain itu bab ini juga membahas mengenai perusahaan kelapa sawit, mulai dari perkembangan kelapa sawit sampai mengaitkan perkebunan kelapa sawit dengan transmigrasi.

Bab III, menjelaskan bagaimana proses penerapan PIR-Trans di Merlung. Pembahasan ini dimulai dari pembebasan lahan, faktor-faktor yang mempengaruhi, hubungan perusahaan inti dengan petani plasma dalam kemitraan, sampai dengan munculnya masyarakat perkebunan kelapa sawit di Merlung. Dalam kemitraan pola PIR-Trans di Merlung, bab ini juga menjelaskan bagaimana perusahaan kelapa sawit masuk dan menanamkan modalnya, serta bagaimana kinerja perusahaan tersebut, dan pembinaan yang dilakukan terhadap petani plasma dalam perkebunan kelapa sawit.

Bab IV, menjelaskan bagaimana dampak setelah diterapkannya program PIR-Trans di Merlung. Dampak ini dilihat dari pengaruh yang ditimbulkan setelah diterapkannya PIR-Trans, baik yang positif maupun yang negatif. Dampak positif berkaitan dengan pendapatan masyarakat, dan bentuk pembangunan dalam pengembangan wilayah. Dampak negatif dapat dilihat dari dampak lingkungan, tanah, serta kesenjangan sosial dan ekonomi. Namun pada bab ini lebih menekankan pada permasalahan tanah dari dampak yang ditimbulkan, baik tanah masyarakat sekitar maupun terhadap tanah perkebunan plasma yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit sebagai pihak inti dalam PIR-Trans di Merlung.

Bab V, merupakan bab terakhir. Bab ini memberikan kesimpulan jawaban dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan sebelumnya.

